

# Perbandingan Tingkat Daya Saing\_Optimal

*by* Suparmono Library\_stimykpn

---

**Submission date:** 22-May-2022 09:36PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1841723905

**File name:** OPTIMAL\_Jurnal\_Ekonomi\_dan\_Bisnis\_Aktual\_Vol\_18\_No\_1\_2021.pdf (312.53K)

**Word count:** 3827

**Character count:** 23867

**PERBANDINGAN TINGKAT DAYA SAING  
ANTARA KABUPATEN DAN KOTA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN LOKAL**

**Suparmono**

email: [suparmono@stimykpn.ac.id](mailto:suparmono@stimykpn.ac.id)

**Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta, Indonesia.**

***Abstract***

*Sectoral competitiveness is required at various levels, both at the national and regional levels. Competitiveness is at least based on locally owned resources and the ability to absorb labor. This article aims to identify sectoral competitiveness between Sleman Regency and Yogyakarta City. The analysis was carried out using a location quotient analysis tool using data from 2013 to 2019. Sleman Regency has 7 (seven) sectors that have competitiveness seen from the LQ value greater than 1, while Yogyakarta City has 10 (ten) sectors has an advantage in terms of competitiveness. Of these competitive sectors, several sectors that have the same competitiveness are the manufacturing sector, the accommodation and food and beverage supply sector, the real estate sector, the corporate services sector, and the education services sector. Meanwhile, the competitiveness of Sleman Regency that is not owned by Yogyakarta City is the construction sector. The contribution of this research is in the form of an analysis which is carried out at the sectoral level, but is complemented to the product level through in-depth interviews.*

*Keywords: competitiveness, Sleman Regency, Yogyakarta City, Location quotient, sectoral*

***Abstrak***

Daya saing sektoral diperlukan pada berbagai tingkat, baik ditingkat nasional maupun daerah. Daya saing tersebut paling tidak didasarkan pada sumber daya yang dimiliki secara lokal dan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi daya saing sektoral antara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan menggunakan alat analisis *location quotient* dengan menggunakan data dari tahun 2013 sampai dengan 2019. Kabupaten Sleman memiliki 7 (tujuh) sektor yang memiliki daya saing dilihat dari nilai LQ yang lebih besar dari 1, sedangkan Kota Yogyakarta terdapat 10 (sepuluh) sektor yang memiliki keunggulan dalam hal daya saing. Dari sektor yang memiliki daya saing tersebut, beberapa sektor yang memiliki kesamaan daya saing adalah sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, sektor real estat, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan. Sementara daya saing Kabupaten Sleman yang tidak dimiliki oleh Kota Yogyakarta adalah sektor konstruksi. Kontribusi penelitian ini adalah dalam bentuk analisis yang dilakukan pada tingkat sektoral, tetapi dilengkapi sampai tingkat produk melalui wawancara mendalam.

Kata Kunci: *daya saing, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Location quotient, sektoral*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Tolok ukur pencapaian pembangunan dapat dilihat atau diukur melalui dua indikator yang terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial. Indikator ekonomi meliputi laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi wilayah, dan distribusi pendapatan. Sedangkan indikator sosial meliputi: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan dan tingkat pengangguran (Tamberan et al., 2020).

Pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan cara menggali segala sumber dana dan daya yang potensial di daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan otonomi luas kepada daerah (merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah) komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai pencerminan dari keikutsertaan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan. Semakin kecil sumbangan PAD terhadap APBD, berarti semakin besar ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat (Rum & Rijoly, 2020).

Di sisi lain, kebanyakan pengelola daerah kurang jeli dalam melihat peluang dan potensi yang ada di daerahnya untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah tersebut. Selain itu juga belum teridentifikasi secara detil mengenai potensi-potensi yang ada, dan belum ada usaha aktif untuk melakukan hubungan dengan investor baik domestik, nasional, maupun internasional. Hal tersebut terjadi antara lain karena belum optimal institusi daerah dalam memasarkan potensi daerahnya. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan potensi daerah diperlukan. Perencanaan pengembangan potensi ekonomi daerah merupakan pekerjaan yang terintegrasi dan berkesinambungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, atau antara suatu bagian tugas dengan bagian tugas lainnya, atau antara satu *stakeholder* dengan *stakeholder* suatu daerah. Sebagai contoh, pengembangan sebuah kawasan wisata akan berkaitan dengan penyiapan industri perhotelan, cinderamata, dan makanan. Berdasarkan perencanaan pengembangan potensi daerah tersebut dapat dilakukan evaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (Fundeanu & Badele, 2014).

Ketimpangan akan menghilangkan sebagian hak masyarakat sebagai akibat dari ketimpangan karena ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kualitas hidup, ketimpangan sosial dan ketimpangan lainnya berdampak pada kesejahteraan hidup (Khondker 2017). Daya saing juga dapat memainkan peran kunci dalam pembangunan pedesaan (Beňuš 2019). Bukti ekonometrik yang langka tentang efisiensi kebijakan industri berkontribusi pada konsensus di antara para ekonom bahwa kebijakan industri biasanya gagal (Domadenik, Koman, dan Prašnikar 2018). Perubahan karakteristik sosial, ekonomi dan regional menyebabkan perbedaan struktur demografi wilayah (Yi 2016) (Khondker, 2017).

Daya saing juga dapat memainkan peran kunci dalam pembangunan pedesaan (Beňuš, 2019). Bukti ekonometrik yang jarang tentang efisiensi kebijakan industri berkontribusi pada konsensus di antara para ekonom bahwa kebijakan industri biasanya gagal (Domadenik, Koman, & Prašnikar, 2018). Perubahan karakteristik sosial, ekonomi, dan wilayah menyebabkan perbedaan struktur demografi wilayah (Yi, 2016).

Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan cara berikut. Pertama, berbeda dengan penelitian dan literatur yang ada tentang kondisi provinsi di Indonesia yang menggunakan tingkat pendapatan untuk memperkirakan ketimpangan antarprovinsi. Kedua, dengan menggunakan kabupaten dan

## Perbandingan Tingkat Daya Saing Antara Kabupaten Dan Kota... (Suparmono)

kota sebagai satuan geografis tingkat terendah, maka dapat dipetakan ketimpangan spasial yang ada di Indonesia berdasarkan perbandingan antar sektor. Ketiga, dalam studi ini, kami memberikan perkiraan bagaimana komponen spasial ketimpangan dan daya saing antar provinsi berkembang dari waktu ke waktu.

Perbedaan daya saing antar kabupaten dan kota di DI. Yogyakarta dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kondisi dan potensi wilayah, karakter penduduk, dan kebijakan pemerintah daerah. Dari faktor penentu tersebut, daya saing antar daerah tentunya perlu disinkronkan oleh pemerintah di tingkat provinsi agar daya saing tersebut dapat saling mendukung antar kabupaten dan kota untuk menciptakan daya saing di tingkat atasnya. Begitupula dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki karakteristik yang berbeda, namun memiliki daya saing yang diharapkan memiliki karakteristik dan pola yang saling mendukung.

### PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan daya saing sektoral antara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta untuk melakukan perbandingan antar sektor dan mengaitkan daya saing tersebut untuk dapat saling mendorong daya saing di Tingkat Provinsi.

### LANDASAN TEORI

Secara universal, energi saing merupakan keahlian buat menciptakan benda serta jasa yang memenuhi persyaratan pasar internasional yang sediakan standar hidup yang lebih baik serta jangka panjang untuk masyarakat (Bernardini, Papalia, Calia, & Filippucci, 2015) (Pizzuto, 2020). Daya saing juga mengacu pada kemampuan perusahaan / industri / kawasan / negara untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dan tingkat lapangan kerja yang relatif tinggi, dan tetap terbuka untuk persaingan internasional (Fundeanu & Badele, 2014). Daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yaitu mengembangkan sektor unggulan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Kharisma, Remi, & Nur, 2020).

Daya saing merupakan fenomena strategis yang melekat pada bidang pemasaran internasional, bisnis internasional, dan manajemen internasional, sehingga dapat mendorong organisasi menjadi lebih kompetitif di pasar global (Poreisz, 2017) (Polynev & Grishina, 2020). Organisasi dapat dipahami secara luas sebagai wilayah, negara, industri, atau mungkin kelompok strategis. Dengan demikian, daya saing adalah keunggulan global yang melibatkan perbandingan dengan level yang sama di suatu wilayah (Rum & Rijoly, 2020).

Untuk mendukung persaingan antar provinsi, transportasi dan komunikasi sangat penting untuk mendorong daya saing masing-masing sektor ekonomi. (Son, 2014). Infrastruktur jalur kereta api, bandara, pelabuhan, gudang, dan bagian jalan beraspal dijadikan indeks daya saing transportasi, termasuk indeks pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di setiap provinsi untuk komunikasi (Vu & Pham, 2016).

Dalam penelitian ini, fokus pada daya saing di tingkat daerah, dan memperluas pekerjaan untuk menganalisis ketimpangan antar sektor di suatu daerah. Terkait daya saing antarprovinsi yang terlihat pada masing-masing sektor akan dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, industri, klaster, wilayah, atau

negara untuk mencapai kinerja ekonomi tingkat tinggi dengan cara memasok barang dan jasa di pasar tertentu yang terekspos persaingan. (Charles & Diaz, 2017) (Das, 2020). Dalam artikel ini, fokus daya saing mengacu pada adanya kondisi yang memungkinkan perusahaan di wilayah tersebut bersaing di pasar pilihan mereka, sehingga nilai yang dihasilkan oleh mereka yang ada di wilayah tersebut. (Constantinescu & Panagoret, 2017).

Defenisi daya saing, kebanyakan didasari pada konsep produktivitas. Suatu daerah yang memiliki produktivitas tinggi dapat dikatakan memiliki daya saing yang tinggi. Dalam konteks produktivitas sebenarnya menggambarkan aspek efisiensi dan efektivitas. Efisiensi lebih mengarah pada input sedangkan efektivitas lebih mengarah pada output. Pambudhi, dalam artikelnya : Daya saing investasi daerah, opini dunia usaha, dalam Departemen perindustrian ( 2007:95): menyatakan bahwa daya saing (competitiveness) pada umumnya didefinisikan sebagai seberapa besar pangsa pasar produk suatu negara dalam pasar dunia.

Defenisi ini didasari pada konsep penguasaan pasar suatu negara dalam pasar dunia (daya saing negara). Atau penguasaan pasar suatu daerah dalam pasar nasional (daya saing daerah). Semakin besar pangsa pasar yang dikuasai suatu negara atau daerah maka dikatakan semakin tinggi daya saing negara atau daerah tersebut.

Defenisi yang lebih luas dari daya saing adalah melibatkan aspek atau kontribusinya pada kesejahteraan dan keberlanjutan pertumbuhan. Menurut satriagung, dalam artikelnya : kendala dan tantangan membangun daya saing daerah, dalam Departemen perindustrian ( 2007:111-124), jadi daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Beberapa indikator daya saing daerah yang disebutkan oleh Pusat studi dan pendidikan ke banksentralan Bank Indonesia adalah: 1) perekonomian daerah, 2) keterbukaan, 3) sistem keuangan, 4) infrastruktur dan sumber daya alam, 5) ilmu pengetahuan dan teknologi, 6) sumber daya alam, 7) kelembagaan, 8) governance dan kebijakan pemerintah, dan 9) manajemen dan ekonomi mikro

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya financial dan bahkan sumberdaya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

dinamika keunggulan daerah di masa mendatang ditandai dengan mampu tidaknya daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetisi pasar bebas baik di tingkat regional maupun global.

## METODE PENELITIAN

### A. Tempat Penelitian

Penelitian dalam artikel ini dilakukan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

### B. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam artikel ini adalah kinerja perekonomian daerah di masing-masing Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang dibedakan secara sektoral. Sektor ekonomi yang menjadi obyek penelitian

**Perbandingan Tingkat Daya Saing Antara Kabupaten Dan Kota...  
(Suparmono)**

ini adalah 19 (sembilan belas) sektor ekonomi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

**C. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kuantitatif yang dilakukan dengan cara menghitung indeks daya saing sektoral di masing-masing daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data PDRB dari tahun 2013 sampai dengan 2019.

**D. Populasi dan Sampling**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berbagai periode penerbitan. Data terdiri dari:

- a. Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman tahun 2013 sampai dengan 2019,
- b. Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta tahun 2013 sampai dengan 2019,
- c. Produk Domestik Regional Bruto DI. Yogyakarta tahun 2013 sampai dengan 2019,
- d. Pertumbuhan Ekonomi DI. Yogyakarta tahun 2013 sampai dengan 2019,
- e. DI. Yogyakarta dalam angka tahun 2013- 2019

**E. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dan mengumpulkan data dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik tahun 2013 sampai dengan 2019. Seluruh data yang digunakan adalah data sekunder.

**F. Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini pada tingkat kabupaten, kota, dan provinsi adalah: a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), b) Pertumbuhan Ekonomi, dan c) Kontribusi sektoral.

**G. Definisi Konsep dan Operasional**

**1. Definisi konseptual**

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah regional atau provinsi dalam kurun waktu satu tahun tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung berdasarkan tahun dasar.
- b. Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi **perekonomian** yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.
- c. Kontribusi sektoral Adalah besaran kontribusi untuk masing-masing sektor dalam PDRB terhadap nilai totalnya, yang nilainya berdasarkan besaran persentase.

**2. Definisi Operasional**

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Metode Perhitungan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Produksi (*production approach*) produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dihitung berdasarkan perubahan nilai dalam pendapatan nasional antar waktu, adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$G_t = \frac{Y_{t-1} - Y_{t-2}}{Y_{t-2}} \times 100$$

Dimana  $G_t$  : pertumbuhan ekonomi tahun  $t$ ,  $Y_{t-1}$ : pendapatan nasional tahun  $t$ , dan  $Y_{t-2}$ : pendapatan nasional tahun  $t-1$  (tahun sebelumnya).

c. Kontribusi Sektoral

Kontribusi dari 19 sektor yang ada di PDRB dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kontribusi_t = \frac{Sektor_t}{Total_t} \times 100$$

Dimana  $Kontribusi_t$  : pertumbuhan ekonomi tahun  $t$ ,  $Y_{t-1}$ : pendapatan nasional tahun  $t$ , dan  $Y_{t-2}$ : pendapatan nasional tahun  $t-1$  (tahun sebelumnya).

## H. Analisa Data

Metode untuk menyusun indeks daya saing regional berdasarkan model dynamic location quotient (LQ). LQ adalah indeks yang paling sering digunakan (Fracasso and Vittucci Marzetti 2018) (Morrissey 2016). Teknik analisis ini digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor termasuk dalam sektor basis atau bukan basis. Formulasi dari teknik analisis tersebut adalah:

$$LQ_{ik} = \frac{X_{ik} / X_k}{X_{in} / X_n}$$

Keterangan:

$LQ_{ik}$  = Location Quotient sektor  $i$  di daerah  $k$

$X_{ik}$  = Nilai tambah sektor  $i$  di daerah  $k$

$X_{in}$  = Nilai tambah sektor  $i$  di tingkat kabupaten  $n$

$X_k$  = PDRB di daerah  $k$

$X_n$  = PDRB di daerah  $n$

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dapat diartikan dalam dua kategori, yaitu:

- Bila nilai LQ lebih kecil atau sama dengan 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan sektor basis.
- Bila nilai LQ lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor basis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Perbandingan Tingkat Daya Saing Antara Kabupaten Dan Kota...  
(Suparmono)**

Dari hasil olahan data terkait dengan daya saing antara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel. 1.**

**Daya Saing Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan menggunakan *Location Quotient*.**

Kategori Sektoral	Nilai LQ	
	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,79	0,02
B. Pertambangan dan Penggalian	0,73	0,00
C. Industri Pengolahan	1,02	1,04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,82	0,15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,47	0,14
F. Konstruksi	1,18	0,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,92	0,85
H. Transportasi dan Pergudangan	1,16	0,73
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,05	1,25
J. Informasi dan Komunikasi	0,97	1,30
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,83	1,70
L. Real Estat	1,15	1,29
M,N. Jasa Perusahaan	1,67	1,06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,81	1,21
P. Jasa Pendidikan	1,17	1,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	1,51
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,87	1,03

Sumber: Hasil olahan data.

Kabupaten Sleman memiliki 7 (tujuh) sektor yang memiliki daya saing dilihat dari nilai LQ yang lebih besar dari 1, sedangkan Kota Yogyakarta terdapat 10 (sepuluh) sektor yang memiliki keunggulan dalam hal daya saing. Dari sektor yang memiliki daya saing tersebut, beberapa sektor yang memiliki kesamaan daya saing adalah sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, sektor real estat, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan. Sementara daya saing Kabupaten Sleman yang tidak dimiliki oleh Kota Yogyakarta adalah sektor konstruksi.

Kota Yogyakarta, beberapa sektor dan sub. sektor unggulan diantaranya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Karena penggunaan LQ dan shift share hanya dapat mengungkap sampai dengan sub. Sektor unggulan, maka penentuan sektor unggulan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan SKPD terkait, misalnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Dinas Pertanian, dan dinas lain yang terkait. Untuk Kota Yogyakarta, produk unggulan daerah lebih diarahkan pada produk jasa berupa industri kreatif dan perdagangan terutama yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan.

Kota Yogyakarta, maka beberapa sektor dan sub. sektor unggulan diantaranya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Karena penggunaan LQ dan shift share hanya dapat mengungkap sampai dengan sub. Sektor unggulan, maka penentuan sektor unggulan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan SKPD terkait, misalnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, dan dinas lain yang terkait. Untuk Kota Yogyakarta, produk unggulan daerah lebih diarahkan pada produk jasa berupa industri kreatif dan perdagangan terutama yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan.

Untuk Kabupaten Sleman, kreatifitas UKM di Sleman relatif berkembang dengan baik, banyak produk-produk Sleman baik yang termasuk dalam 5 (lima) produk unggulan di atas maupun produk yang masuk dalam kategori unggulan lainnya, andalan, potensial diolah kembali menjadi produk baru yang bernilai tambah. Industri pengolahan local di Kabupaten Sleman ini tentunya berpotensi memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kabupaten Sleman memiliki 7 (tujuh) sektor yang memiliki daya saing dilihat dari nilai LQ yang lebih besar dari 1, sedangkan Kota Yogyakarta terdapat 10 (sepuluh) sektor yang memiliki keunggulan dalam hal daya saing.
2. Dari sektor yang memiliki daya saing tersebut, beberapa sektor yang memiliki kesamaan daya saing adalah sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, sektor real estat, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan. Sementara daya saing Kabupaten Sleman yang tidak dimiliki oleh Kota Yogyakarta adalah sektor konstruksi.
3. Perlu kolaborasi antar kabupaten dan kota yang ada di DI. Yogyakarta untuk mendorong daya saing yang lebih besar, misalnya dalam menentukan produk unggulan daerah yang ditopang dan ditentukan dari sumber daya lokal yang tersedia dan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja.

### B. Saran

1. Diperlukan koordinasi dan sosialisasi, baik secara vertikal maupun horizontal berkaitan dengan pengembangan yang bersifat integratif. Koordinasi secara vertikal diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pembinaan, bantuan, dan fasilitasi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, kementerian, dan lembaga tepat pada sarannya, yaitu pada sektor, sub sektor, maupun produk yang memiliki keunggulan di daerah. Apabila produk, sektor, maupun sub sektor yang memiliki

**Perbandingan Tingkat Daya Saing Antara Kabupaten Dan Kota...  
(Suparmono)**

keunggulan telah dapat diidentifikasi, berarti efek yang akan ditimbulkan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai lokus.

2. Pengembangan konsep pemasaran dan promosi dengan melibatkan pemerintah maupun swasta. Produk unggulan daerah yang telah diidentifikasi oleh masing-masing kabupaten dan kota di DI. Yogyakarta tidak akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku utama bila tanpa diiringi oleh konsep pemasaran dan promosi yang tepat. Pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi dapat melakukan fasilitasi berupa pendampingan dan bantuan pameran produk unggulan daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
  
3. Pendampingan dalam hal administratif dan pembukuan untuk mempermudah akses permodalan dari perbankan. Prioritas perencanaan perlu dilakukan untuk mendorong daya saing produk unggulan daerah. Salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan untuk mendorong daya saing tersebut selain pemasaran dan promosi adalah melalui pendampingan administratif dan kesiapan dalam mengakses permodalan ke lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Dengan mampu mengakses permodalan ke lembaga keuangan melalui administrasi yang tertata, maka produk unggulan daerah tersebut lebih mudah untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azam, M., & Bhatt, V. (2018). Spatial Income Inequality in India, 1993–2011: A Decomposition Analysis. *Social Indicators Research*, 138(2), 505–522. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1683-4>
- Bernardini Papalia, R., Calia, P., & Filippucci, C. (2015). Information Theoretic Competitiveness Composite Indicator at Micro Level. *Social Indicators Research*, 123(2), 349–370. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0745-0>
- Charles, V., & Díaz, G. (2017). A Non-radial DEA Index for Peruvian Regional Competitiveness. *Social Indicators Research*, 134(2), 747–770. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1444-9>
- Constantinescu, L. M., & Panagoret, I. (2017). Digital Economy a Link to Competitiveness of Romania from Regional to Global. *Revista de Management Comparat Internațional*, 18(3), 326–342.
- Das, A. (2020). Regional Competitiveness Analysis: A Prime Focus on Region's Spatio-Functional Gap and Median Population Threshold Assessment. *SSRN Electronic Journal*, 541–549. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3641755>
- Fundeanu, D. D., & Badele, C. S. (2014). The Impact of Regional Innovative Clusters on Competitiveness. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 124, 405–414. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.502>
- Kharisma, B., Remi, S. S., & Nur, Y. H. (2020). Competitiveness Analysis of Regencies and Cities in West Java Province. *Economics Development Analysis Journal*, 8(4), 303–314. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i4.30852>
- Khondker, H. H. (2017). Globalization and inequality. *International Sociology*, 32(2), 170–179. <https://doi.org/10.1177/0268580916687458>
- Kumar, S. (1996). Regional inequalities , economic growth and liberalisation : A study of the Indian economy. *The Journal of Development Studies*, 32(3), 364.
- Pizzuto, P. (2020). The role of regional competitiveness in shaping the heterogeneous impact of the Great Recession. *Regional Science Policy and Practice*, 12(2), 267–290. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12196>
- Polynev, A., & Grishina, I. (2020). Regional Competitiveness as a Component of the Foresight Model of Russia's Competitiveness: A Solution Within the Spatial Development Strategy. In *Lecture Notes in Networks and Systems* (Vol. 111). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-39797-5\\_66](https://doi.org/10.1007/978-3-030-39797-5_66)
- Poreisz, V. (2017). *Competitiveness Of Cities And Performance Of Companies In The Case Of Hungarian Regional Centers*. 10(01), 399–416.
- Rum, I. A., & Rijoly, J. C. D. (2020). Determine Regional Strategy in Improving the Competitiveness of Agricultural Commodities in Global Markets. *Media Ekonomi*, 27(2), 107. <https://doi.org/10.25105/me.v27i2.5796>
- Son, M. (2014). A Comparative Analysis on the Competitiveness of the Korean, Chinese and Japanese Fashion Industries: The Generalized Double Diamond Model Approach. *Fashion Business*, 18(6), 67–85. <https://doi.org/10.12940/jfb.2014.18.6.67>

**Perbandingan Tingkat Daya Saing Antara Kabupaten Dan Kota...  
(Suparmono)**

- Tamberan, Y. W., Tawakal, M. A., Betaubun, S., Lamalewa, F., Kore, E. L. R., & Anwar, A. I. (2020). The allocation of special autonomy funds and their impact on regional economic inequality in Papua Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012031>
- Vu, H. T., & Pham, L. C. (2016). A dynamic approach to assess international competitiveness of Vietnam's garment and textile industry. *SpringerPlus*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-1912-3>
- Yi, C. (2016). Relationship Between the Formation Conditions and Durations of One-Person Households in the Seoul Metropolitan Region. *Demography*, 53(3), 675-697. <https://doi.org/10.1007/s13524-016-0465-y>

# Perbandingan Tingkat Daya Saing\_Optimal

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**20%**

SIMILARITY INDEX

**20%**

INTERNET SOURCES

**12%**

PUBLICATIONS

**12%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

3%

★ dosen.unimma.ac.id

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On